

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.2, Desember 2019

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,
Desember 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Moch. Nurhasim	125–136
• Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019 Muhammad Imam Subkhi	137–154
• Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia) Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• Problematisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Sri Yanuarti	209–228
Review Buku	
• Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sutan Sorik	229–235
Tentang Penulis	236–237

CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam praktiknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019 ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA) ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**FORMULA KONVERSI SUARA
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA
PADA SISTEM KEPARTAIAN:
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**PARADOKS PEMILU SERENTAK
2019: MEMPERKOKOH
MULTIPARTAI EKSTREM DI
INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM
PUSARAN SIBER DALAM PROSES
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX
DAN PERILAKU MEMILIH:
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

**PROBLEMATIK REKRUTMEN
PENYELENGGARA PEMILU**

DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

DDC: 324.2

Sri Yanuarti

PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

DDC 321.8

Sutan Sorik

REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA
AND ITS IMPACT ON THE PARTY
SYSTEM: EVALUATION OF 2019
CONCURRENT ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124

In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.

Keywords: Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS
ELECTIONS IN 2019:
STRENGTHENING EXTREME
MULTIPARTY IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136

Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.

Keywords: Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

**REDESIGN OF VOTERS'
REGISTRATION DURING 2019 POST-
ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154

One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.

Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

**POLITICAL PARTY
SIMPLIFICATION THROUGH
PARLIAMENTARY THRESHOLD:
SYSTEMATIC VIOLATION OF
PEOPLE'S**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166

Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.

Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE
ANNOUNCEMENT OF THE 2019
SIMULTANEOUS ELECTIONS
RECAPITULATION RESULTS**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178

The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

Keywords: Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

DDC: 324.9598
Ferdinand Eskol Tiar Sirait

HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

Keywords: Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

DDC: 324.6598
Muhammad Nuh Ismanu

PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

Keywords: Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

DDC: 324.2
Sri Yanuarti

**STATE FUNDING TO POLITICAL
PARTIES: EXPERIENCE IN
SELECTED COUNTRIES**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-
228**

Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.

Keywords: Party Politic, Democracy, State Funding

DDC: 321.8
Sutan Sorik

**BOOK REVIEW: CONSIDERING
DEMOCRACY TWO DECADES OF
REFORM**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-
235**

This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.

Keywords: Considering Democracy, Two Decades of Reform

UJARAN KEBENCIAN, *HOAX* DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)

HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Fisip UPN Veteran Jakarta
Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi UI
Email: ferdinand2935@gmail.com

Diterima: 2 September 2019; Direvisi: 9 September 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

Abstract

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

Keywords: *Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election*

Abstrak

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci: ujaran kebencian, *hoax*, media digital, perilaku memilih, pilpres

Pendahuluan

Pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan Pemilu serentak yaitu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang bersamaan dengan juga dilaksanakannya Pemilihan Legislatif (Pileg) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPR Prov), dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota). Keserentakan 2 (dua) jenis pemilu ini berdampak terhadap terbentuknya dukungan partai politik yang sudah terjadi sejak awal mengusung calon Presiden Pilpres 2019.

Pilpres 2019 adalah pengulangan pilpres 2014, di mana calon presiden yang berkontestasi adalah calon yang sama yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pada pilpres 2019 ini pasangan calon Joko Widodo dan KH. Ma'aruf Amin diusung oleh mayoritas parpol yang duduk di DPR, yaitu sebanyak 6 (enam) parpol terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), ditambah 3 (tiga) parpol baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno didukung 4 (empat) parpol yang duduk di DPR yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, ditambah 2 (dua) parpol baru yaitu Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Meskipun kontestasi Pilpres 2019 merupakan pengulangan kontestasi Pilpres 2014, friksi politik pada pilpres 2019 ini lebih tajam dan keras dibandingkan dengan pilpres 2014. Friksi ini diyakini merupakan efek dari polarisasi yang tercipta sejak pilpres 2014 dan berlanjut pada pilkada DKI 2017. Polarisasi yang terjadi dapat terlihat dari maraknya penggunaan kampanye hitam yang menyerang masing-masing kandidat. Kampanye tidak lagi berada dalam koridor normatif yang seharusnya, melainkan berkembang menjadi kampanye

yang menggunakan ujaran kebencian dan berita bohong atau *hoax*.

Polarisasi dimulai dari pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno—yang merepresentasikan capres Prabowo Subianto—mengalahkan pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful yang merupakan representasi dari kubu Joko Widodo. Pada kontestasi pilkada DKI tersebut isu agama menjadi faktor dominan dan penentu. Pernyataan Ahok pada saat berada di kepulauan seribu yang dianggap menghina umat muslim memberikan andil yang besar.

Pola kampanye hitam menjadi jamak ditemui terutama masa sebelum pemilu serentak 17 April 2019 lalu. Kampanye hitam dibuat dan direproduksi sebagai bagian dari strategi kampanye yang mengidentifikasi lawan sebagai aktor yang jahat. Kampanye hitam yang bermuatan ujaran kebencian dan berita bohong menjadi bagian sentral dalam *framing* yang dikondisikan.

Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk melihat salah satu dimensi penting kampanye hitam, yakni ujaran kebencian dan *hoax*. Fokus tulisan ini terutama pada pola ujaran kebencian dan *hoax* ini serta sejauhmana kedua elemen ini mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Indonesia pada pilpres 2019.

Perilaku memilih bisa dedefinisikan dengan tindakan seseorang untuk memilih salah satu dari beberapa kontestan yang berlaga dalam sebuah pemilihan umum. Untuk menjelaskan mengapa seseorang memilih kandidat A dan bukan B atau C, literatur perilaku politik terbagi ke dalam tiga pendekatan besar yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.¹

Pendekatan sosiologis secara umum menjelaskan bahwa alasan memilih karena faktor karakteristik sosial dan kelompok sosial yang dipandang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan pilihan seseorang. Karakteristik modal sosial seperti pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain atau latar belakang sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, dan lainnya

¹ Fisher, Justine, E., Franklin, Mark N., Gibson, R., Cantijoch, M., & Wlezen, C., *Voting Behavior and Public Opinion* (the Routledge Handbook of Elections, 2018).

merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.

Pendekatan kedua adalah pendekatan psikologis. Dalam pendekatan psikologis, pemilih memiliki perilaku yang tetap dalam memilih dan mendukung partai politik yang sama setiap kali pemilihan umum. Kandidat pun dipilih berdasarkan partai yang diidentifikasi oleh pemilih tersebut. Pendekatan psikologis memberikan penjelasan yang berbeda tentang perilaku memilih, di mana pendekatan ini menekankan karakteristik sosial pemilih.

Pendekatan psikologi atau disebut juga dengan Model Michigan ini berfokus pada sikap individu pemilih serta identifikasi mereka dengan salah satu partai politik politik. Para peneliti mazhab Michigan berpendapat bahwa biasanya pemilih cenderung mengidentifikasi parpol secara psikologis seperti halnya dengan agama, ras, dan etnis. Kemudian identifikasi parpol harus dilihat sebagai faktor jangka panjang dari sistem politik.

Dalam model ini identifikasi terhadap partai politik dilakukan sangat kuat karena tidak hanya berdampak pada pilihan suara, tapi juga berpengaruh pada sikap evaluasi kandidat partai, masalah saat ini dan kondisi partai politik terkait pemungutan suara².

Jadi Model Michigan menghasilkan tiga poin besar: (1) individu mengidentifikasi partai politik seperti mengidentifikasi agama, kelas, ras dan etnis; (2) identifikasi partai politik harus dilihat sebagai komponen sistem politik yang sifatnya jangka panjang; (3) identifikasi partai biasa dibentuk sebelum individu dewasa, biasa dipengaruhi oleh orangtua³.

Pendekatan terakhir adalah pendekatan rasional. Dalam pendekatan ini, pemilih memilih kandidat berdasarkan pertimbangan rasional. Salah satu pertimbangan rasional yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *economic voting*, yakni pemilih memilih kandidat berdasarkan evaluasinya terhadap kinerja ekonomi kandidat sebelumnya (*retrospective voting*) dan ekspektasi

akan kondisi ekonomi (baik pribadi maupun ekonomi nasional) pada masa yang akan datang.⁴

Namun di luar tiga paradigma besar ini, beberapa peneliti dan pakar juga memfokuskan pada peranan kampanye sebagai pembentuk perilaku pemilih. Kampanye pemilihan sebagian besar dilakukan untuk menarik perhatian pemilih pada masalah-masalah spesifik. Tantangan abadi bagi partai politik adalah bagaimana untuk meyakinkan pemilihnya⁵. Penggunaan medium untuk berkampanye saat ini tidak hanya menggunakan media analog namun sudah mengandalkan media digital seperti media sosial dan media *online*. Strategi kampanye menjadi kunci yang digunakan para pihak untuk menarik perhatian pada isu-isu tertentu dalam kampanye termasuk kampanye negatif. Berbeda dengan seruan “positif”, di mana seorang kandidat atau partai menjalankan tugasnya sendiri, kampanye negatif berkonsentrasi pada kelemahan yang dirasakan lawan atau kebijakan mereka⁶.

Kampanye adalah bagian dari proses komunikasi politik. Pada masa pemilu, kampanye merupakan saat dimana kontestan yang berkontestasi idealnya memaparkan visi dan misi mereka dan meyakinkan para pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih. Proses kampanye memberikan efek terhadap hasil pemilu yang sebagian besar terfokus pada perilaku pemilih⁷. Artinya, agar kampanye mempengaruhi hasil pemilu, mereka harus membuat warga negara untuk mengubah pilihan suara berdasarkan informasi yang disajikan selama kampanye. Efek kampanye dapat terlihat ketika peristiwa yang terjadi selama kampanye menyebabkan preferensi pemilih berubah.

⁴ Lewis-Beck, Michael S, Paldam, Martin, “Economic voting: an introduction”. *Electoral Studies*. 19 (2000): 113–121; Lewis-Beck, Michael. S., and Mary Stegmaier. “Economic Determinants of Electoral Outcomes.” *Annual Review of Political Science* 3 (2000): 183–219

⁵ Hillygus, D. S., & Shields, T. G. “The Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaigns” dalam D. Sunshine Hillygus and Todd G. Shields. *Political Psychology*, Vol. 30 (2009): 973–976.

⁶ Lau, R. R., & Rovner, I. B. “News Coverage of Negative Political Campaigns” *Journal of Social Philosophy*, 24, 1 (1993): 103–113.

⁷ Damore, D. F. “Using campaign advertisements to assess campaign processes”, 7857 (October 2016): 20–38.

² Fisher, Justine, E., Franklin, Mark N., Gibson, R., Cantijoch, M., & Wlezen, C., *Voting Behavior and...*

³ Fisher, Justine, E., Franklin, Mark N., Gibson, R., Cantijoch, M., & Wlezen, C., *Voting Behavior and...*

Selanjutnya Damore mengatakan bahwa untuk sebagian besar, hipotesis kegiatan ini mirip dengan teori psikologi sosial tentang *priming*. Teori ini berpendapat bahwa pemilih tidak mencari informasi lengkap tentang kandidat atau mereka tidak mempertimbangkan semua dimensi masalah potensial ketika mengevaluasi kandidat. Sebaliknya, pemilih cenderung lebih bergantung pada isu-isu yang ditonjolkan selama kampanye. Dengan demikian dari perspektif ini kampanye tidak diharapkan untuk mengubah sikap semata, melainkan untuk menyusun informasi di mana para pemilih berada. Pemilih atau masyarakat akan membedakan nada kampanye dari kualitas informasi yang didapatkan dan akan merespons secara berbeda terhadap iklan politik baik positif dan negatif⁸. Hasil ini memiliki implikasi bagaimana masyarakat memandang kampanye sebagai proses politik⁹.

Sederhananya tujuan dari kampanye adalah menampilkan hal yang baik bagi pemilih dan pada saat yang sama mengurangi daya tarik pesaingnya. Dua jenis perilaku itu yang disebut kampanye positif dan negatif¹⁰. Kampanye negatif dapat pula dikatakan untuk menyerang atau mengkritik lawan politik secara eksplisit, dimana serangan itu juga dapat diarahkan pada program-program politik dan prestasi, kualifikasi profesional, partai, pendapat dan pengalaman, dan lainnya¹¹. Bentuk ekstrem dari kampanye negatif adalah kampanye hitam. Dalam kampanye hitam, seorang calon tidak hanya berupaya menampilkan sisi buruk atau negative dari lawan namun juga membuat fitnah dan berita bohong tentang lawan sehingga membuat pemilih semakin antipati dengan lawan tersebut. Serangan kampanye hitam pada pilpres 2019 secara umum terdiri dari ujaran kebencian dan berita bohong yang menyerang pasangan

⁸ Leonard, C., & Virginia, B. "Negative Campaign Advertising: Demolizer or Mobilizer?" *American Political Science Review*, 93 (December 1999): 891–899.

⁹ Sides, J., Lipsitz, K., & Grossmann, M. "Do voters perceive negative campaigns as informative campaigns?" *American Politics Research*, 38, 3 (2010): 502–530.

¹⁰ Dolezal, M., & Mu, W. C. "Who will attack the competitors? How political parties resolve strategic and collective action dilemmas in negative campaigning", (November 2015)

¹¹ Hansen, Kasper M., & Pederson, R. T. "Negative campaigning in a multiparty system". *Representation*, 44, 1 (2008): 27–39.

calon baik secara personal maupun sebagai paslon. Kampanye negatif maupun hitam relatif efektif untuk penantang, sementara kampanye positif lebih efektif untuk petahana¹². Kampanye negatif mungkin tidak hanya memiliki efek perilaku jangka pendek tetapi juga efek pada sikap yang mendasari seperti kepercayaan pada politisi atau kandidat dan peningkatan partisipasi politik¹³

Salah satu faktor pengkondisian yang potensial adalah jenis kampanye yang digunakan. Kampanye negatif umumnya dianggap melibatkan iklan negatif, menyerang karakter, moral, atau kebijakan lawan. Pendekatan yang diambil dalam kampanye menjadi faktor yang penting¹⁴. Pada perhelatan pilpres 2019 ini dapat dilihat iklan-iklan yang bermuatan kampanye negatif. Konten kampanye negatif dibuat menjadi strategi penonjolan isu-isu tertentu dalam kampanye baik positif atau negatif yang dapat mempengaruhi pemilih (*salience*) yang membingkai bagaimana pihak lawan menjadi buruk, dan pada akhirnya pemilih mempunyai pandangan yang buruk pula terhadap kandidat lawan tersebut¹⁵.

Pilpres 2019 ini terlihat berbeda dengan pilpres-pilpres sebelumnya yang tidak menjadikan isu agama sebagai salah satu isu yang sentral. Pada pilpres sebelumnya pengaruh orientasi agama atau aliran, yang dioperasionalkan sebagai religiusitas Muslim pada pemungutan suara 1999 dan 2004 menunjukkan hasil yang terbatas. Dalam istilah komparatif, data Indonesia tidak memberikan dukungan pada proposisi bahwa agama memberikan pengaruh penting pada perilaku memilih.¹⁶

¹² Lau, R. R., & Pomper, G. M. "Effectiveness of Negative Campaigning in U.S. Senate Elections", 46, 2 (2002): 415–427.

¹³ Kleinnijenhuis, J., Van Hoof, A. M. J., & Oegema, D. "Negative news and the sleeper effect of distrust." *Harvard International Journal of Press/Politics*, 11, 2 (2006): 86–104.

¹⁴ Min, Y. "News Coverage of Negative Political Campaigns." *Harvard International Journal of Press/Politics*, 9, 4 (2004): 95–111.

¹⁵ Leonard, C. and Virginia, B. "Negative Campaign Advertising: Demolizer or Mobilizer?", *American Political Science Review*, 93 (December 1999): 891–899.

¹⁶ Liddle, R. W., & Mujani, S. "Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia". *Comparative Political Studies*, 40, 7 (2007): 832–857.

Tidak ada satu pun pendekatan dalam studi perilaku memilih yang menjadi alasan utama untuk dijadikan rujukan untuk menjelaskan kemenangan seorang kandidat dalam kontestasi Pemilu. Namun demikian melihat kondisi politik sekarang dan karakteristik masyarakat Indonesia saat ini, kemungkinan pendekatan sosiologis menjadi salah satu hal yang dominan dalam perilaku memilih masyarakat Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Kampanye negatif yang bersubstansikan politik identitas bisa saja membawa dampak terhadap perubahan perilaku pemilih yang ada di sebuah wilayah provinsi dengan basis keagamaan yang kuat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris.¹⁷ Dalam penelitian empiris, argumen-argumen yang dihasilkan harus difalsifikasi oleh data. Reviu Literatur atau Studi Pustaka digunakan dalam artikel ini sebagai metode penelitian. Tipe reviu yang digunakan adalah *descriptive*. *Literature Reviews* memiliki dua bentuk: (1) reviu yang menyajikan latar belakang (*background reviews*) sebuah ilmu empiris, dan (2) reviu yang merupakan bagian yang berdiri sendiri (*stand-alone reviews*)¹⁸. Perbedaan dari keduanya adalah, *background reviews* biasanya digunakan untuk dasar keputusan dalam pembuatan desain penelitian, menyediakan konteks teoretikal, atau identifikasi perbedaan antara literatur dengan kajian yang ingin dipenuhi¹⁹. Sedangkan *stand-alone reviews* bertujuan untuk memahami tubuh literatur yang ada melalui agregasi, penjelasan, atau integrasi penelitian yang telah dilakukan²⁰.

¹⁷ Van Evera, Stephen, *A Guide to Methods for the Students of Political Science*. (NY: Cornell University Press, 1997); Creswell, John W. *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 4th eds. (CA: Sage, 2014).

¹⁸ Trudel, M., Jaana, M., Kitsiou, S., & Pare, G. "Information & Management Synthesizing information systems knowledge : A typology of literature reviews". *Information & Management*, 52 (2015): 183–199.

¹⁹ Levy, Y., & Ellis, T. J. "A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research". *Informing Science Journal*, 9 (2006): 181–212.

²⁰ Rousseau, D. M., Manning, J., & Denyer, D. "Evidence in Management and Organizational Science : Assembling the Field's Full Weight of Scientific Knowledge Through Syntheses". *The Academy of Management Annals*, 2, 1 (2008): 475–515.

Dalam penelitian ini, literature review yang dilakukan adalah *stand-alone literature review* yang bersifat deskriptif. Dalam literature review model ini, penulis mencoba menjawab pertanyaan penelitian menggunakan penelitian-penelitian yang ada dan menjadikan hasil-hasil penelitian ini sebagai *secondary data* untuk menopang argument yang ditawarkan dalam penelitian ini.²¹

Data mengenai ujaran kebencian dan berita *hoax* diperoleh dari database Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI. Database ini berisi ujaran kebencian dan berita *hoax* yang dikumpulkan dari berbagai postingan di media sosial (Tweeter, Facebook dan Instagram) dan portal berita online.

Pencarian data dalam akun media sosial ini dilakukan berdasarkan serangkaian kata kunci yang merujuk pada nama dan padanan kata dalam konteks isu-isu yang bertendensi ujaran kebencian dan berita bohong yang diarahkan pada dua pasang calon yang berlaga, yakni Joko Widodo, Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga S. Uno. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sistem *Intelligence Perception Analysis* (IPA). Melalui system ini, semua postingan *real time* dari ketiga jenis media sosial dan media berita online yang memuat kata, frase dan kalimat yang sudah ditentukan akan langsung dibaca dan dipetakan secara otomatis dengan menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini sendiri didesain dengan menggunakan algoritma berbasis *Natural Language Processing* (NLP) yakni, Teknik komputasi untuk mengenali dan membaca bahasa alami (natural) manusia. Dengan Teknik-teknik ini, kita bisa mengidentifikasi kicauan netizen yang bersifat menyerang, pada siapa serangan itu diarahkan dan apa isu yang diangkat.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis menggunakan proses ini adalah data selama 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara pada

²¹ Paré, G., & Templier, M. "A Framework for Guiding and Evaluating Literature Reviews". *Communications of the Association for Information Systems*, 37(2015): 112–137; Xiao, Y., & Watson, M. "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review." *Journal of Planning Education and Research*, 39, 1 (2019): 93–112.

17 April 2019 yaitu periode 16 Maret sampai dengan 16 April 2019.

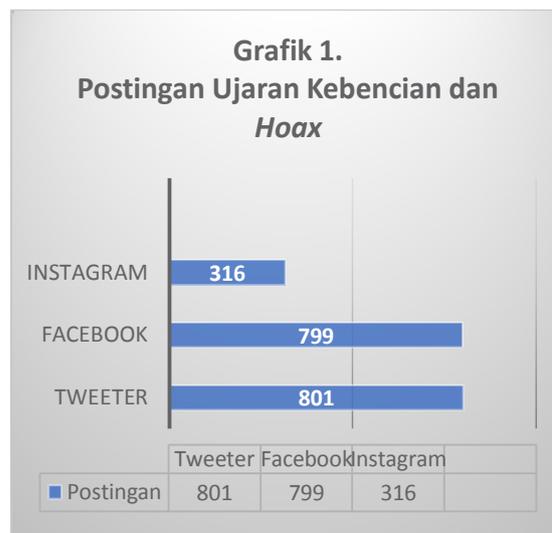
Pembahasan

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa pasangan calon Jokowi-Amin terpapar kampanye negatif berupa ujaran kebencian dan berita bohong yang lebih banyak dibandingkan pasangan calon Prabowo-Sandi. Hasil pemantauan dari 3 (tiga) platform media sosial twitter, facebook, dan instagram terhadap kampanye negatif yang menerpa masing-masing pasangan capres 2019 terlihat bahwa isu politik identitas dan agama adalah salah satu yang terbesar dan menjadi “*top of mind*”. Isu agama terutama menerpa Jokowi. Data dari Indonesia Indicator menyebutkan, sekitar 23 percent dari jumlah ujaran kebencian dan *hoax* yang menyerang Jokowi di Tweeter berhubungan dengan isu agama. Proporsi yang sama juga terjadi di media sosial Facebook.²²

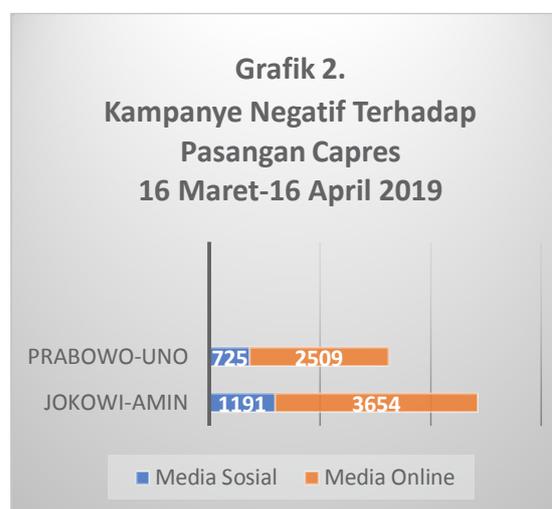
Dari data yang didapatkan, Tweeter merupakan platform paling banyak digunakan sebagai media penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong dengan jumlah 801 postingan. Facebook menempati posisi kedua sebagai media paling banyak menyebarkan ujaran kebencian dan *hoax* dengan jumlah 799 Sementara Instagram merupakan media paling tidak lazim digunakan sebagai penyebar ujaran kebencian dan *hoax*. Selama sebulan terakhir sebelum Pemilu Serentak 2019, jumlah ujaran kebencian dan berita *hoax* yang menyebar dari media ini hanya berjumlah 316.²³ Pola unggahan di tiga platform juga masih merujuk pada ujaran kebencian dibandingkan dengan berita bohong.

²² Badan Pengawas Pemilu RI (2019). Pemantauan Hoax 16 Maret-16 April 2019. Database Bawaslu.

²³ *ibid*



Sumber: BAWASLU RI

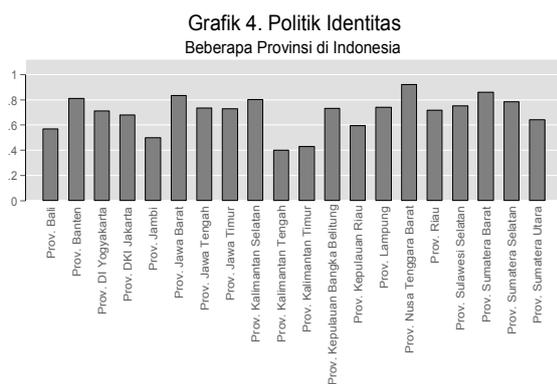


Keterangan: kampanye negative ini meliputi semua ujaran kebencian dan *hoax* serta bentuk kampanye lainnya yang bersifat menyerang.

Berdasarkan hasil perbandingan kampanye negatif di media digital pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin di media sosial (Twitter, Facebook, Instagram) berjumlah 1.191 dan media online berjumlah 3.654. Sementara kampanye negatif yang didapat kubu Prabowo-Sandiaga Uno cenderung lebih rendah, yaitu 725 yang diterima di media sosial (Twitter, Facebook, Instagram) dan media online berjumlah 2.509. Meningkatnya ujaran kebencian dan berita *hoax* pada Jokowi, dari perspektif analisis media sosial memang sangat dimungkinkan mengingat di ranah virtual ini kekuasaan terdesentralisasi sedemikian rupa sehingga setiap orang punya keberanian

Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mayoritas kristen dan Bali, yang mayoritas Hindu, dengan selisih kemenangan yang cukup besar dari pesaingnya.

Menguatnya pengaruh ujaran kebencian dan *hoax* di daerah-daerah yang keislamannya kuat ini dikarenakan isu-isu utama dalam ujaran kebencian dan *hoax* ini adalah isu-isu agama.²⁶ Dan di daerah-daerah dengan keislaman yang kuat isu agama sangat menentukan pilihan politik mereka.²⁷



Sumber: Indonesian Family Life Survey Data 2015

Menurut pendekatan sosiologis kampanye politik pada pemilu memiliki dua efek, yaitu memperkuat pilihan dan memotivasi para *swing voters*. Kecenderungan ini dikaitkan dengan tiga jenis karakteristik sosial: (1) status kelas sosial warga negara; (2) identifikasi terhadap ras atau agama; dan (3) demografi wilayah negara tempat tinggal seorang warga pedesaan atau perkotaan. Maka jika dilihat dari hasil suara yang didapat terlihat bahwa identifikasi terhadap agama cukup kuat mempengaruhi pilihan masyarakat khususnya yang bermukim di daerah tingkat keislamannya tinggi.

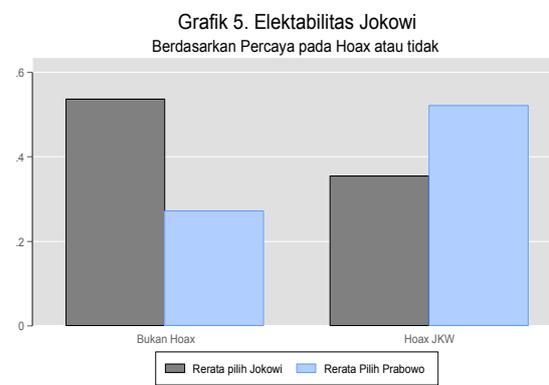
Di Provinsi Aceh agregat pengurangan suara Jokowi-Ma'Aruf Amin mendapatkan angka terbesar yakni 509.121 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan penambahan suara yang cukup signifikan yaitu 1.311.456 suara. Daerah lainnya di Pulau Sumatera yaitu di

²⁶ Badan Pengawas Pemilu RI (2019)..,

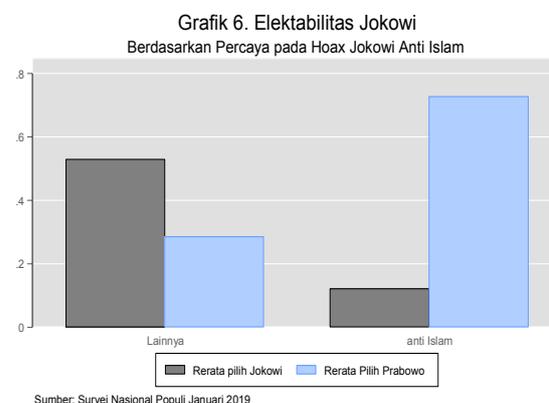
²⁷ Arif, Sirojuddin, Afrimadona, dan Ronnie R. Nataatmaja "Does Social Capital Increase Religious Voting? Evidence from Indonesia", *Paper Presented at Midwest Political Science Association Conference*. Chicago, IL: 6 April 2018.

Provinsi Sumatera Selatan Jokowi-Ma'aruf Amin mendapatkan pengurangan suara 131.537 suara, di Provinsi Sumatera Selatan Jokowi-Ma'aruf Amin juga mendapatkan pengurangan suara 84.062 suara. Di Pulau Jawa, penurunan suara yang signifikan juga didapatkan oleh Jokowi-Ma'aruf Amin di Provinsi Banten sebanyak 655.147 suara. Di daerah lainnya, Sulawesi Selatan penurunan suara Jokowi-Ma'aruf Amin cukup signifikan 919.435 suara.

Menurut penulis, penurunan suara Jokowi terutama di daerah-daerah dengan keislaman yang kuat ini bisa diduga karena ujaran kebencian dan *hoax* yang berbasis agama yang sangat kuat di daerah-daerah ini. Sebagaimana yang ditemukan dalam survei nasional Lembaga riset opini publik Populi Center yang dirilis Januari 2019 lalu, masyarakat yang cenderung terpapar dan percaya dengan *hoax* dan ujaran kebencian terhadap Jokowi cenderung untuk tidak mau memilih Jokowi (lihat grafik 5). Lebih jauh, mereka yang percaya bahwa Jokowi anti-Islam sangat tidak mau untuk memilih Jokowi dan lebih cenderung mengalihkan dukungan mereka pada Prabowo (lihat grafik 6)

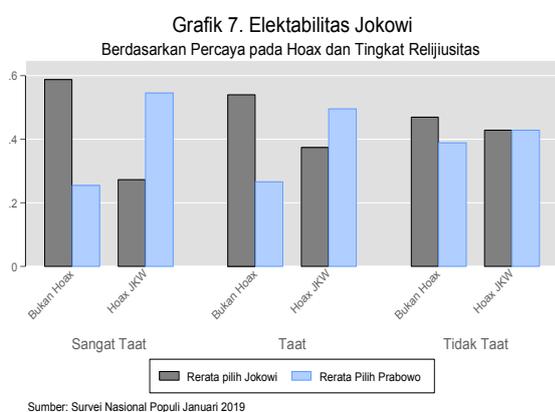


Sumber: Survei Nasional Populi Januari 2019

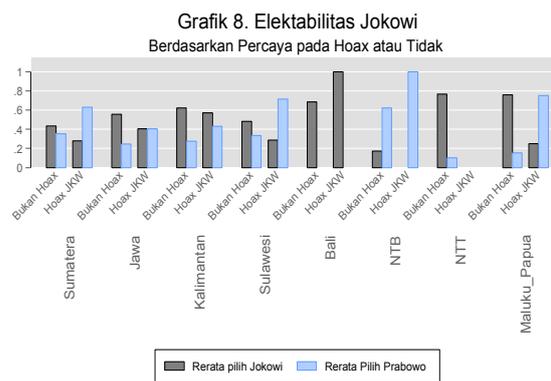


Sumber: Survei Nasional Populi Januari 2019

Survei Populi Center juga menemukan bahwa tingkat religiusitas menjadi variable penting yang mempengaruhi relasi antara keyakinan seseorang terhadap hoax atas diri Jokowi dengan kecenderungan dia untuk memilih Jokowi. Sebagaimana diperlihatkan oleh Grafik 7 berikut, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar pengaruh *hoax* terhadap kecenderungan dia untuk memilih Jokowi. Bagi responden (pemilih) yang sangat taat, *hoax* atas diri Jokowi akan membuat kecenderungan dia untuk memilih Jokowi jauh lebih kecil dibandingkan dengan responden yang taat atau tidak taat.



Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa *hoax* terhadap Jokowi, terutama isu “Jokowi Anti Islam” yang tersebar di media sosial memberikan efek yang cukup signifikan bagi perilaku memilih masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat keagamaanya tinggi. Sebagaimana juga terlihat pada Grafik 8 berikut, pengaruh *hoax* atas diri Jokowi terutama cukup kuat di daerah dengan basis keislaman yang kuat seperti Sumatera, Sulawesi dan NTB. Namun, untuk daerah-daerah dimana konstituen non-muslim mayoritas seperti Bali dan NTT (dengan pengecualian Maluku dan Papua), *hoax* atas diri Jokowi hampir tidak ada (kalau pun ada tidak memiliki pengaruh).



Meskipun pengaruh kampanye negative (termasuk bentuk kampanye hitam seperti *hoax* dan ujaran kebencian) terhadap perilaku politik cukup besar di daerah-daerah dengan identitas etnis dan keagamaan yang kuat, secara agregat nasional kampanye negative masih memiliki pengaruh yang terbatas. Ini diindikasikan dengan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Piplres 2019 ini meskipun pasangan ini mendapat serangan ujaran kebencian dan *hoax* lebih banyak dibandingkan penantangannya.

Pertanyaannya selanjutnya yang muncul adalah bagaimana kita melihat keterbatasan pengaruh kampanye hitam secara nasional ini. Jika kampanye hitam tidak bisa bekerja efektif di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi dan identitas etnis dan agama yang kuat, apa faktor penting yang mempengaruhi perilaku memilih mereka? Menurut penulis, bisa jadi faktor *sosio-psikologis* menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat di sebagian besar wilayah-wilayah ini. Pendekatan ini menawarkan identifikasi partai yang diartikan sebagai keterikatan psikologis dengan salah satu partai politik. Hal ini berarti seseorang yang bukan anggota partai politik (masyarakat biasa) memiliki ketertarikan dengan tokoh politik bukan saja berdasarkan status kelas, ras, atau agama, tetapi juga karena identifikasi partainya. Identifikasi partai ini memiliki dua karakter yakni arah dan kekuatan. Arah diartikan seperti golongan partai, sedangkan kekuatan adalah intensitas ketertarikan seseorang terhadap tokoh politik.

Hal ini terlihat jelas pada hasil rekapitulasi suara di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Tengah suara Jokowi-Ma'aruf Amin meningkat 3.866.051 dan di Provinsi Jawa Timur meningkat 4.562.355. Walaupun penduduk di Provinsi Jawa Tengah mayoritas beragama Islam namun wilayah tersebut merupakan basis pendukung Partai PDIP yang menjadi pengusung Jokowi-Amin. Demikian pula dengan provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah basis pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), salah satu partai politik pengusung Jokowi-Amin. Di provinsi ini Jokowi juga memperoleh suara yang lebih besar dari pesaingnya.

Dari sisi kekuatan Jokowi-Amin sangat kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur karena Jokowi berasal dari Solo, Jawa Tengah dan Ma'aruf Amin adalah Tokoh Organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) yang perkembangannya sangat masif di wilayah Jawa Timur.

Dengan demikian, untuk memahami perilaku politik masyarakat Indonesia pada umumnya, kita perlu melihat beberapa aspek dan tentu saja kampanye menjadi bagian penting dari aspek itu.

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye negatif atau lebih tepatnya kampanye hitam berupa ujaran kebencian dan berita bohong telah menyerang semua pasangan calon yang berkontestasi pada Pilpres 2019. Selain menggunakan media *mainstream*, kampanye negatif dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Jokowi-Amin secara umum lebih banyak mendapatkan kampanye negatif dibandingkan penantangannya, Prabowo-Uno. Serangan terhadap Jokowi-Amin ini terjadi baik di media sosial maupun dalam berita *online*.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kampanye negatif dengan isu agama dan politik identitas sedikit banyaknya mampu merubah perilaku pemilih sosiologis di wilayah dengan kondisi kehidupan masyarakat yang kental dengan nuansa keislaman. Namun demikian, kampanye negatif dan hitam ini kurang memberikan pengaruh di wilayah atau provinsi

yang perilaku memilihnya lebih didasarkan pada pertimbangan psikologis, yakni kedekatan pada partai politik pengusung paslon capres 2019.

Meskipun demikian, secara agregat nasional, kampanye negatif dan hitam ini tidak dapat meruntuhkan dominasi politik Jokowi-Amin di mata pemilih Indonesia. Secara nasional, perolehan suara pasangan ini tetap lebih tinggi dari pesaingnya. Ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa hal pemilih tetap berpikir rasional dan berhati-hati dalam menyaring informasi.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretik yang cukup jelas bahwa kampanye negatif dan hitam hanya mampu mempengaruhi perilaku memilih ketika faktor-faktor sosiologis seperti identitas etnis dan religius berperan dalam menentukan preferensi politik pemilih. Dengan kata lain, faktor sosiologis merupakan *antecedent variable* dalam relasi antara kampanye hitam dan perilaku memilih. Secara empirik, hasil ini juga memberikan dukungan ilmiah lebih lanjut bagi studi-studi terdahulu mengenai relasi antara kampanye negatif dengan perilaku politik.²⁸

Dari perspektif kebijakan, kampanye negatife dan hitam jelas memiliki dampak yang cukup buruk bagi demokrasi. Kampanye negatif akan dapat membuat pemilih apatis terhadap pemilu dan ini tentu saja akan menurunkan minat mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Secara umum, pada akhirnya kampanye hitam ini dapat mendelegitimasi hasil pemilu dan proses demokrasi di negeri ini.

Daftar Pustaka

- Badas, A., & Stauffer, K. E. "Voting for women in nonpartisan and partisan elections." *Electoral Studies*, 57 (March 2018): 245–255. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.10.004>
- Bartels, L. M. "The Study of Electoral Behavior Forthcoming" (in much-abbreviated form). *The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior*, (1987). Retrieved from https://moodle.haverford.edu/pluginfile.php/95120/mod_resource/content/1/bartels_electoral_behavior.pdf

²⁸ Stephen Ansolabehere, Shanto Iyengar, Adam Simon and Nicholas Valentino, "Does Attack Advertising Demobilize the Electorate?" *American Political Science Review* 88, 4 (1994): 829-838.

- Chang, A. C. Hsien. "Why do they vote out of habit? Habitual voting under diverse regimes in East Asia". *Democratization*, 25, 2 (2018): 227–250. <https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1341493>
- Damore, D. F. "Using campaign advertisements to assess campaign processes," 7857 (October 2016): 20–38. <https://doi.org/10.1300/J199v03n01>
- Dolezal, M., & Mu, W. C. "Who will attack the competitors? How political parties resolve strategic and collective action dilemmas in negative campaigning," (November 2015). <https://doi.org/10.1177/1354068815619832>
- Fisher, Justine, E., Franklin, Mark N., Gibson, R., Cantijoch, M., & Wlezen, C. *Voting Behavior and Public Opinion. the Routledge Handbook of Elections, 2018*.
- Green, D. P., & Shapiro, I. "Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications" *Political Science*, 110, 2 (1994).
- Guzmán, F., & Sierra, V. "A political candidate's brand image scale: Are political candidates brands". *Journal of Brand Management*, 17, 3 (2009): 207–217. <https://doi.org/10.1057/bm.2009.19>
- Hansen, Kasper M., & Pederson, R. T. "Negative campaigning in a multiparty system." *Representation*, 44, 1 (2008): 27–39. <https://doi.org/10.1080/00344890701869082>
- Harsin, J. "Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies." *Communication, Culture and Critique*, 8, 2 (2015): 327–333. <https://doi.org/10.1111/cccr.12097>
- Haselmayer, M., Meyer, T. M., & Wagner, M. "Fighting for attention: Media coverage of negative campaign messages," (July 2017). <https://doi.org/10.1177/1354068817724174>
- Hillygus, D. S., & Shields, T. G. "The Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaigns - By D. Sunshine Hillygus and Todd G. Shields". *Political Psychology* Vol. 30 (2009): 973–976. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2009.00739.x>
- Joathan, Í. "Negative campaign in the Brazilian presidential race: an analysis of the attacks posted on Facebook by the main candidates." *Contemporary Social Science*, 14, 1 (2019): 71–88. <https://doi.org/10.1080/21582041.2017.1369557>
- Kleinnijenhuis, J., Van Hoof, A. M. J., & Oegema, D. "Negative news and the sleeper effect of distrust". *Harvard International Journal of Press/Politics*, 11, 2 (2006): 86–104. <https://doi.org/10.1177/1081180X06286417>
- Lau, R. R., & Pomper, G. M. "Effectiveness of Negative Campaigning in U.S. Senate Elections," 46, (2002): 415–427.
- Lau, R. R., & Rovner, I. B. "News Coverage of Negative Political Campaigns." *Journal of Social Philosophy*, 24, 1 (1993): 103–113. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.1993.tb00498.x>
- Leonard, C., & Virginia, B. "Negative Campaign Advertising: Demolizer or Mobilizer?" *American Political Science Review*, 93 (December 1999): 891–899.
- Levy, Y., & Ellis, T. J. "A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research". *Informing Science Journal*, 9 (2006): 181–212.
- Liddle, R. W., & Mujani, S. "Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia." *Comparative Political Studies*, 40, 7 (2007): 832–857. <https://doi.org/10.1177/0010414006292113>
- Lim, M. "Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies*, 49, 3 (2017): 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Martin, P. S. "Inside the black box of negative campaign effects: Three reasons why negative campaigns mobilize." *Political Psychology*, 25, 4 (2004): 545–562. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2004.00386.x>
- Min, Y. "News Coverage of Negative Political Campaigns." *Harvard International Journal of Press/Politics*, 9, 4 (2004): 95–111. <https://doi.org/10.1177/1081180x04271861>
- Paré, G., & Templier, M. "A Framework for Guiding and Evaluating Literature Reviews." *Communications of the Association for Information Systems*, 37 (2015): 112–137. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03706>
- Rousseau, D. M., Manning, J., & Denyer, D. "Evidence in Management and Organizational Science: Assembling the Field's Full Weight of Scientific Knowledge Through Syntheses." *The Academy of Management Annals*, 2, 1 (2008): 475–515. <https://doi.org/10.1080/19416520802211651>
- Russmann, U. "Negative Campaigning in Party-Controlled Communication Channels: Party Communication Strategies in Campaign Posters", Newspaper Advertisement, and Press Releases during the 2008 Austrian National Election Campaign. *Journal of Political Marketing*, 16, 2 (2017): 95–117. <https://doi.org/10.1080/15377857.2014.959693>

- Sides, J., Lipsitz, K., & Grossmann, M. "Do voters perceive negative campaigns as informative campaigns?" *American Politics Research*, 38, 3 (2010): 502–530. <https://doi.org/10.1177/1532673X09336832>
- Trudel, M., Jaana, M., Kitsiou, S., & Pare, G. "Information & Management Synthesizing information systems knowledge : A typology of literature reviews." *Information & Management*, 52 (2015): 183–199. <https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008>
- Urbatsch, R. "Feminine-sounding names and electoral performance." *Electoral Studies*, 55 (June 2018): 54–61. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.06.004>
- Xiao, Y., & Watson, M. "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review." *Journal of Planning Education and Research*, 39, 1 (2019): 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>

TENTANG PENULIS

Chastiti Mediafira Wulolo

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email chastitimw@gmail.com.

Edward Samuel Renmaur

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: 3dw4rd5r@gmail.com.

Ferdinand Eskol Tiar Sirait :

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ferdinand2935@gmail.com.

Jerry Indrawan

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Konstroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: jerry.indrawan@paramadina.ac.id

M. Prakoso Aji

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: prakosoaji@upnvj.ac.id.

Muhammad Imam Subkhi

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id.

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Muhammad Nuh Ismanu

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu_nunu@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

